

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang – Undangan dan Putusan Pengadilan.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 5 Tahun 2014, LN No.6 Tahun 2014, TLN No. 5494, Pasal 1 angka 15.

_____, Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP No. 60 Tahun 2008, LN No. 127 Tahun 2008, TLN No. 4890, Pasal 1 angka 3.

_____, Peraturan Presiden tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perpres Nomor 192 Tahun 2014, Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 2014, TLN Nomor 4400 Pasal 1 ayat (1).

_____, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Lembar Negara No. 4355 Tahun 2008 TLN No. 4890, Pasal 49 ayat (2).

_____, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Intern Pemerintah.

_____, *Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, UU. No. 15 Tahun 2004, Lembaran Negara No. 5 Tahun 2004 TLN No. 4400 Pasal 13 dan 14.

_____, Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP No. 60 Tahun 2008, Lembaran Negara No. 60 Tahun 2008, TLN No. 4890, Pasal 1 ayat 1.

_____, Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *Op. Cit.* Pasal 56.

Penjelasan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan BPKP No. 3 Tahun 2019, Pasal 3.

B. Buku

Azbary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.

Bappenas, *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang Baik (Good Public Governance in Brief)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan, 2005.

Bastian Indra dan Gatot Soepriyanto, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Buku 1*. Jakarta: Salemba 4, 2002.

Bastian Indra dan Gatot Soepriyanto, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Buku 1*. Jakarta: Salemba 4, 2002.

Dian Cita Sari, et. al., *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Djafar Muhammad Saidi, *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Djafar Muhammad Saidi, *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Dwiyanto Agus. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press, 2006.

Ganie Meuthia -Rochman, *Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya*. Jakarta: Komnas HAM, 2000.

Karina Lalolo, *Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.

Mahfud Moh. M.D, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006.

Manan Bagir, *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta : FH UII Pers, 2003.

Marbun SF. dan Moh. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, *Etika Kepemimpinan Aparatur*. Jakarta: LAN RI, 2008.

- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Mulyadi, *Auditing*, edisi 6, jilid 1. Jakarta: Salemba 4, 2002.
- Notohamidjojo O., *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Nurul UU Huda, *Hukum Lembaga Negara*. Bandung : Refika Aditama, 2020.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Salam dan Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty, 1981.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press, 1986.
- Soeprapto Riyadi, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Jakarta: Habibie Center, 2004.
- Sutedi Adrian, *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Sutedi Adrian, *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tjokroamidjojo Bintoro, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2004.
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, cetakan II. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Wahyono Padmo, *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.

Yamin Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Zainul Yuswar Basri, Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005.

C. Lain – lain

“Kewenangan BPKP”, tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawasan_Keuangan_dan_Pembangunan#Tugas_dan_Fungsi_serta_Kegiatan_yang_dilakukan, diakses tanggal 10 Januari 2021.

“Pengertian Kedudukan” tersedia di: <http://www.brainly.c0.id/tugas/26254261>. diakses tanggal 26 November 2020.

“Pengertian Peranan” tersedia di: <http://id.m.wikipedia.org/wiki/peranan>. diakses tanggal 26 November 2020.

“Pengertian Tinjauan”. tersedia di: <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=196514>. diakses tanggal 24 Oktober 2020.

“Pengertian Yuridis” tersedia di: <http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-yuridis/>. diakses tanggal 24 Oktober 2020.

“Tugas dan Fungsi BPKP”, tersedia di: <http://www.bpkp.go.id/konten/1/Tugas-dan-Fungsi.bpkp>, diakses tanggal 10 Januari 2021.

Agung Suseno, “Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 17, Nomor 1, Januari-April Tahun 2010, hlm. 30.

Andhika Danesjvara, “Beberapa Masalah dalam Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan di Indonesia”, *Makalah Disampaikan dalam Seminar, Reformasi Birokrasi Indonesia*, Diselenggarakan oleh DPRM UI, Balai Sidang UI-Depok, 16 September 2009: 2.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern

Pemerintah Indonesia, Keputusan Nomor: Kep-005/Aaipudpn/2014, hlm. 10.

<http://www.bpkp.go.id/babel/konten/1947/Kedudukan-Tugas-Fungsi-dan-Kewenangan-Perwakilan-BPKP-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung.bpkp>, diakses tanggal 10 Januari 2021.

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Renstra/20BPKP/202015-2019.pdf>, diakses tanggal 10 Desember 2021.

Maya Sari, SEMINAR NASIONAL EKONOMI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG, "Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara", 2015, hlm. 574.

Murtapa I Ketut Budartha, "Analisis Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika pada Kualitas Audit di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan", *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 20, 3 September Tahun 2017, hlm. 2103.